

Dampak Covid-19 Melalui Digitalisasi UMKM

Diana Novita¹, Agus Herwanto², Khasanah³, Jeni Andriani⁴ Eko Cahyomayndarto⁵, Dwi Rorin Mauludin Insana⁶

¹ Teknik Informatika, Universitas Esa Unggul

² Teknik Informatika, Universitas Esa Unggul

³ Teknik Informatika, Universitas Siber Asia

⁴ Manajemen, Universitas Pamulang

⁵ Akuntansi, Universitas Tama Jagakarsa

⁶ Manajemen, Universitas Indraprasta

Email: diana.novita@esaunggul.ac.id

Abstract. *The COVID-19 pandemic has had a significant impact on the economy, social and politics. This is not only experienced by big countries, but almost all countries in the world. It seems that there is not a single country in the world that is not affected by Covid-19. Indonesia is one of the countries affected especially on the economic side. Indonesia, where 90% of its economy is supported by Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), needs to pay special attention to this sector. Because MSMEs are an important part of the economy or are the wheels of the Indonesian economy, the current pandemic has resulted in many MSMEs having collapsed with falling incomes and also the large number of workers being laid off because they are no longer able to bear the costs of a quiet work life. This is what makes the increase in unemployment from the employment side while from the other side, of course, reduces the income of state finances. Because of the important role of MSMEs in Indonesia, the government finally provided and changed many policies to overcome these problems, one of which was the provision of financial assistance for poor and affected MSMEs. Apart from that, now MSMEs are starting to recognize what is called the "new face of the world economy", namely electronic-based commerce (e-commerce) which fades jurisdictional barriers (borderless) offering great benefits and opportunities for the economy. The presence of e-commerce is believed to be able to boost economic growth. At the same time, the trend of digitization has disrupted conventional trading arrangements and created new complexities. In response to this condition, an electronic-based trade cooperation forum was formed to formulate e-commerce trading rules. Indonesia needs to maximize the benefits of e-commerce regulation in international trade, especially for MSMEs, while minimizing the potential negative impact.*

Keyword : *UMKMs, digitization, protection, economic recovery, economic growth*

Abstrak. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup besar dibidang ekonomi, sosial, dan politik. Hal ini tidak saja dialami oleh negara-negara besar, tetapi hampir seluruh negara di dunia. Sepertinya tidak ada satu pun negara didunia ini yang tidak terdampak covid-19. Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak terutama pada sisi ekonomi. Indonesia yang 90% perekonomiannya ditopang oleh Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) perlu memberikan perhatian khusus terhadap sektor ini. Karena UMKM merupakan bagian yang penting didalam perekonomian atau merupakan roda perekonomian Indonesia, maka dalam kondisi pandemic sekarang ini mengakibatkan banyaknya UMKM yang terpuruk dengan pendapatan yang anjlok dan juga banyaknya tenaga kerja yang diberhentikan karena mereka tidak mampu lagi menanggung biaya kehidupan tenang kerjanya. Hal inilah yang menjadikan peningkatan pengangguran dari sisi ketenag kerjaan sementara dari sisi lainnya, tentunya mengurangi pemasukan keuangan negara. Karena pentingnya peranan UMKM ini di Indonesia, akhirnya pemerintah memberikan dan merubah banyak kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut salah satunya adalah penyediaan bantuan dana bagi UMKM yang miskin dan terdampak. Selain itu pula, kini UMKM mulai

mengenal apa yang disebut sebagai “wajah baru perekonomian dunia” yaitu perdagangan berbasis elektronik (e-commerce) yang memudahkan sekat-sekat yuridiksi (borderless) menawarkan manfaat dan peluang besar bagi perekonomian. Kehadiran e-commerce diyakini dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Di saat bersamaan, tren digitalisasi telah mendisrupsi tatanan perdagangan konvensional dan menimbulkan kompleksitas baru. Menyikapi kondisi ini, dibentuk forum kerja sama perdagangan berbasis elektronik untuk memformulasikan aturan perdagangan e-commerce. Indonesia perlu memaksimalkan manfaat pengaturan e-commerce dalam perdagangan internasional terutama bagi UMKM, sekaligus meminimalkan potensi dampak negatifnya.

Kata Kunci : UMKM, digitalisasi, perlindungan, pemulihan ekonomi, pertumbuhan ekonomi

PENDAHULUAN

Diawal tahun 2020. Banyak ihak berpikir optimis akan perekonomian Indonesia akan menjadi lebih baik daripada tahun – tahun sebelumnya. Optimism ini bukanlah omong kosong belaka, karena menurut perkiraan *Prompt Manufacturing Index (PMI)*, menyatakan bahwasannya Bani Indonesia (BI) mengalami kenaikan pada kuartal I-2020 menjadi 52,73%, angka meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya yaitu hanya mencapai 51,50%. Optimism juga muncul pada angka indicator ekonomi makro didalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada awal tahun 2020, yang mermatok angka pertumbuhan ekonomi di angka 5.3% lebih tinggi dibandingkan dari RABN 2019 yang hanya sebesar 5,2%. Tak hanya sampai situ saja, salah satu badan dunia yaitu IMF, memberikan gambaran ekonomi global dunia akan tumbuh sebesar 3,3% pada tahun 2020. Bahkan menurut gambaran prediksi seluruh Lembaga utama didunia, menyatakan bahwasannya, aka nada peningkatan disini perekonomian dan perdagangan dunia ditahun 2020 ini. Tetapi pada akhir 2019, dunia dikejutkan oleh adanya virus COVID-19 yang berawal terjadi di Wuhan, Thionghoa. Kejadian yang sangat tragis tersebut tidak saja dirasakan oleh Wuhan tetapi seluruh dunia pun terkena imbas dari kejadian tersebut. Negara – negara didunia mulai dilanda pandemic yang kini sudah hampir 1 tahun lamanya menjangkiti seluruh dunia. Yah bisa katakan, manusia boleh punya rencana tetapi rencana Allah siapa yang akan tahu. Itulah yang terjadi saat ini. Dunia berperang dengan makhluk kecil yang dinamakan virus. Sebagai pemimpin di negara Indonesia ini, akhirnya pada tanggal 31 Maret 2020, presiden Joko Widodo,

menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur seputar pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pada saat bersamaan, juga ditandatangani Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa pandemic covid-19 merupakan bencana nasional. Dan DKI Jakarta merupakan [rovinsi pertama yang tercatat pertama kali untuk menerapkan kebijakan ini. Karena pem,Batasan inilah mengakibatkan menyusutnya pendapatan masyarakat. Padahal, mobilitas masyarakat inilah yang merupakan kunci utama darim roda perekonomian di DKI Jakarta. Menurunnya pendapatan masyarakat dan terbatasnya mobilitas masyarakat inilah awal dari segala acaman pandemic bagi setiap negara yang ada didunia saat ini. Kondisi seperti inilah yang memicu pemerintah mengambil beragam Langkah dan kebijakan fiscal untuk mneyelamatkan negara dari keterpurukan akibat pandemic covid-19. Kebijakan dan otoritas yang diambil pemerintah terutama disektor monoter dan keuangan negara. Selain itupula, tak kalah pentingnya adalah masalah Kesehatan masyarakatnya, juga harus segera ditangani. Pemerintah juga melakukan berbagai upaya lanjutan untuk memulihkan ekonomi nasional yang menurun drastis tersebut.

METODE

Saat kami menyampikan ini adalah melalui forum pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada 20 Januari 2021 pukul 10.00 hingga selesai melalui media video conference zoom. Dengan peserta dari UMKM yang ada di Jakarta, Bekasi, Cirebon, Bandung dan Surabaya. Alhamdulillah acara berjalan lancar dan UMKM pun terlihat antusiasme nya mengikuti kegiatan

pengabdian masyarakat yang kami laksanakan. Dan dari hasil kegiatan ini kami menyimpulkan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana merubah bisnis konvensional mereka menjadi bisnis menggunakan platform online atau e-commerce ?
- b. Platform apakah yang pas untuk digunakan sebagai media pemasaran produknya ?
- c. Bagaimanakah skema perlindungan yang ditawarkan oleh pemerintah ??

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selain memprioritaskan Kesehatan masyarakat, pemerintah pun memberikan dan menawarkan berbagai kebijakan dan penanggulangan keterpurukan ekonomi di Indonesia. Tak hanya pemberian bantuan sembako dan uang tunai bagi masyarakat yang sangat terdampak akan pandemic covid-19 ini, tetapi juga pemerintah membuat delapan skema bantuan social bagi masyarakat. Selain itu, ada berbagai insentif yang ditawarkan kepada masyarakat kecil. Semua itu diperuntukan untuk masyarakat golongan kecil maupun menengah. Seperti dikatakan diatas, pandemic ini sangat berdampak pada berbagai sector di masyarakat Indonesia dan dunia. Secara social, aktivitas masyarakat otomatis berhenti termasuk aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja yaitu para pelaku UMKM, yang notabene, masih banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Karena di Indonesia, UMKM merupakan penyangga ekonomi nasional. Para UMKM yang terdampak inilah menyumbang angka pemutusan hubungan tenaga kerja yang cukup banyak dan menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Selain itu, penurunan aktivitas konsumsi masyarakat mengakibatkan penurunan disektor riil seperti investasi maupun ekspor-impor. Penurunan kinerja di sektor riil ini kemudian juga mengganggu kinerja sektor keuangan. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya memprioritaskan Kesehatan dan penyembuhan masyarakatnya tetapi juga merancang kebijakan untuk memulihkan ekonomi Indonesia. Strategi pemerintah dalam memerangi dampak Covid-

19 ini dapat dilihat secara konkret dari porsi perencanaan anggaran belanja pemerintah.

Skema pertama adalah

- Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 37,4 triliun.
- Kedua, kartu sembako sebesar Rp 43,6 triliun.
- Ketiga, bansos tunai non-Jabodetabek sebesar Rp 32,4 triliun.
- Keempat, bansos sembako Jabodetabek sebesar Rp 6,8 triliun.
- Kelima, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa sebesar Rp 31,8 triliun.
- Keenam, kartu prakerja dengan anggaran sebesar Rp 20 triliun
- Ketujuh, logistik/pangan/sembako dengan anggaran sebesar Rp 25 triliun.
- Kedelapan, kartu Pra Kerja.

Kedelapan bentuk perlindungan sosial tersebut termasuk bagian dari program besar PEN dari sisi permintaan (demand), ditambah dengan insentif bunga perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan anggaran sebesar Rp 1,3 triliun. Di luar delapan bantuan dan satu insentif tersebut, terdapat pula insentif perpajakan (dari sisi supply) yang dapat diterima oleh masyarakat, yakni pembebasan PPh 21. Selain sepuluh bantuan tersebut, mulai bulan Agustus 2020, pemerintah juga akan memberikan bantuan subsidi upah (BSU) bagi 15,7 juta peserta BP Jamsostek yang berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan. Sehingga total terdapat 11 bentuk bantuan pemerintah yang diterima langsung masyarakat selama pandemi Covid-19 hingga akhir Agustus 2020.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan teori diatas dapat dikatakan bahwa sebenarnya sudah banyak juga cara pemerintah untuk melindungi para UMKM dengan memberikan banyak bantuan kepada mereka. hanya saja bantuan tersebut tidak tepat pada sasarannya dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan. Hal inilah yang menjadi dilema sendiri dikalangan para UMKM yang merasa tidak diperhatikan atau diperdulikan oleh pemerintah. Bahkan adakalanya juga timbul suatu masalah social baru yang berakibat panjang seperti kasus korupsi dana bantuan yang dilakukan oleh

pejabat pemerintah dll. Hal – hal ini lah yang menjadikan negara kita dan para UMKM nya semakin terpuruk karena kondisi negara yang tak menentu. Ditambah lagi, bermunculannya oknum – oknum dari masyarakat sendiri yang menyebabkan banyaknya UMKM mungkin menjadi tertipu oleh ulah orang – orang yang tidak bertanggung jawab. Dilemma memang tetapi itulah yang terjadi dinegara kita ini. Contohnya adalah Program Bantuan Langsung Tunai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (BLT UMKM), yang kini telah diperpanjang oleh Kementerian Koperasi (Kemerkop) dan UMKM hingga tahun 2021 ini. Namun, sebagian masyarakat banyak yang mengeluh karena tidak berhasil mendapatkan BLT UMKM senilai Rp2,4 juta. Padahal, mereka kerap mengakui telah melakukan pendaftaran.

REFERENSI

- COVID-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. (2020). *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 0(0), 59–64.
<https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3870.59-64>
- Pakpahan, A. K. (2020). Menyelamatkan Penjualan Ritel di Tengah Pandemi Covid-19. *Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*.
- Zanuar Rifai, & Meiliana, D. (2020). Pendampingan Dan Penerapan Strategi Digital Marketing Bagi Umkm Terdampak Pandemi COVID-19. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
<https://doi.org/10.31949/jb.v1i4.540>

- Putra, I. G. A. A. S., & Saskara, I. A. N. (2013). Efektivitas dan dampak program bantuan kredit usaha rakyat (KUR) terhadap pendapatan dan kesempatan kerja usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Denpasar. *E-Jurnal EP Unud*.
- Septian, F. (2020). *Ziswaf dan Resesi Ekonomi di Era Pandemi*. 17 April.
- Christian, M., & Hidayat, F. (2020). Dampak Coronavirus terhadap Ekonomi Global. In *Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerja sama Internasional*.
- Awaloedin, D. T., Sazali, Nurhilaludin, & Hanifa, M. (2020). Strategi Menghadapi Dampak Pandemi covid 19 terhadap Usaha Kecil dan Menengah Dipa Teruna Awaloedin Sazali Nurhilaludin Muthia Hanifa. *Manajemen*.

sumber dari website :

- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4430274/menteri-teten-optimis-umkm-bisa-selamatkan-ekonomi-dari-krisis-akibat-covid-19>
- <https://investor.id/business/berkolaborasi-menaklukkan-pandemi>
- <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kebijakan-perlindungan-dan-pemulihan-umkm-di-tengah-pandemi-covid-19>
- <https://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-091151969/sudah-coba-daftar-namun-belum-dapat-blt-umkm-rp24-juta-ini-solusinya>